

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 ditinjau dari aspek Tujuan dan Standar yang jelas, Sumber daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik Organisasi, Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi, serta Disposisi bahwa kebijakan tersebut belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih terdapat kendala pada setiap aspeknya diantaranya:

1. Tujuan dan Standar yang jelas

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 telah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, namun belum terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian. Peran pimpinan dan auditor internal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan secara berkala mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam rangka pemenuhan indikator penilaian IKPA. Dengan demikian, IKPA dapat menjadi bahan masukan atas kebijakan yang diambil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan alokasi dana, distribusi maupun regulasi terkait keuangan negara agar lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Sumber daya

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 sudah cukup dari segi jumlah anggaran dan jumlah pengelola keuangan. Namun, para pengelola keuangan sebagian besar tidak mengetahui ketentuan dan formulasi setiap indikator penilaian IKPA. Maka dari itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala oleh bagian Sekretariat Kementerian secara menyeluruh dengan memantau setiap indikator penilaian IKPA.

Namun, para pengelola keuangan sebagian besar tidak mengetahui ketentuan dan formulasi setiap indikator penilaian IKPA. Maka dari itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala oleh bagian Sekretariat Kementerian secara menyeluruh dengan memantau setiap indikator penilaian IKPA.

3. Komunikasi antar Organisasi

Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 sudah konsisten sesuai dengan ketentuan baik dari segi substansi dan waktu pelaporannya. Kegiatan rapat rutin dengan agenda membahas indikator penilaian IKPA masih perlu dilakukan.

4. Karakteristik Organisasi

Indikator Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan pada bagian Sekretariat, karena memiliki fungsi melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Namun, Biro Umum dan Biro Perencanaan kurang baik dalam koordinasi pemenuhan indikator penilaian IKPA. Maka perlu disusun SK TIM Kerja yang menangani IKPA untuk memperjelas lagi pembagian tugas dan satu sistem kerja yang terintegrasi.

5. Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi

Pejabat dan pengelola keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian rutin melakukan diskusi dengan pegawai KPPN terkait implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebagian saja yang mengetahui tujuan dan substansi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Sosialisasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 perlu diadakan untuk meningkatkan literasi pegawai.

6. Disposisi

Belum ada penolakan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 karena Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum familiar dengan peraturan tersebut. Sosialisasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 perlu dilakukan.

B. Saran

Rekomendasi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pimpinan dan auditor internal dalam mengevaluasi setiap indikator penilaian IKPA hingga ke implementor kebijakan;
- b. Mengadakan Bimbingan Teknis kepada pengelola keuangan agar tujuan implementasi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 yaitu memperlancar pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian;
- c. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan mengacu pada delapan indikator penilaian IKPA. Dengan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat di akselerasi dan dilaksanakan pada awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung;
- d. Menyusun SK TIM Kerja beserta aturan pelaksanaan atau SOP turunan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022.
- e. Menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai acuan pengeluaran anggaran sehingga diharapkan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan besaran dan waktu pencairan dananya serta output yang ditargetkan relevan dan realistis.
- f. Menyosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai langkah mendukung strategi peningkatan capaian nilai IKPA.

Penelitian ini hanya mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta pada aspek lingkungan politik tidak melakukan penggalian informasi yang mendalam kepada pegawai KPPN Jakarta II. Oleh karena itu masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam untuk menentukan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi evaluasi pelaksanaan anggaran APBN. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain seperti pengaruh pemberian insentif anggaran terhadap capaian penilaian indikator IKPA dan melakukan penggalian informasi yang mendalam terhadap aspek lingkungan politik khususnya kepada pegawai KPPN Jakarta II.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2017). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anggara, M.Sahya (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul Wahab, M. Solichin (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- P. Siagian, M. Sondang (2018). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Artikel atau Jurnal

- Akhmadi, M. H., Oktorinus, A., & Wati, E. N. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. *Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V*, Volume 8, Nomor 1.
- Arnida, A. (2022). Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung*, Vol 4, No 1..
- Faridah, E., Setyadi, B., Gunarto, M., & Fitriasuri. (2023). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang. *Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin)*, Vol. 19 No.4.
- Fauzi, W. E., & Arif, L. (2021). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. *Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban*, Volume 4 Number 2.
- Kaiya, Y. N. (2022). Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso. *Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso*, Vol 22 No 2 2022.
- Nirwana, I., Roza, S., & Afniyeni. (2022). Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. *Pengaruh Edukasi dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran*, Volume 1, Nomor 2,.
- Nurdyanto, S. D. (2021). Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. *Pengaruh Kepatuhan Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN SATKER Mitra Kerja KPPN MAMUJU*, Volume 3, Issue 3.
- Rahayu, Y. S., & Kautsar, W. A. (2023). UIN Sunan Gunung Djati. *Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama*, Vol. 2 (1) 2023.
- Sukmono, R. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. *Pengaruh Tingkat Eselonisasi Dan Besaran Anggaran Yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran*, Vol.4, No.1.

Utomo, E. S. (2022). Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi . *Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Provinsi Jambi)*, Vol. 11 No. 04.

Wijayanti, S. I., & Khotimah, H. (2023). Universitas Trilogi. *Analisis Dampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Pada Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan Di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020*, Volume 4, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan

Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun (Nirwana, Roza, & Afniyeni, 2022)2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per -5/PB/2022 Tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara.

D. Dokumen lainnya

Laporan Kinerja Triwulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun

2022. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Aplikasi OM-SPAN

Nota Dinas/Undangan/Surat Dinas